

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, hasil yang telah diraih di bidang pendidikan tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Kemajuannya memang telah nyata jika dibanding dengan belasan atau puluhan tahun silam. Namun jika dibanding dengan kemajuan yang dicapai bangsa lain, peringkat mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal.

Dalam hal prestasi, Indonesia hanya menempati peringkat di atas 111 dunia, satu peringkat di atas Vietnam dan jauh di bawah Malaysia (peringkat 59). Padahal, pada tahun 70-an sampai 80-an banyak pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia. Bahkan sejumlah guru-dosen se-Indonesia di boyong ke negeri jiran ini, karena mereka masih kekurangan tenaga profesional keguruan.¹

Perbandingan lain adalah data yang dimiliki Human Development Index (HDI). Data HDI menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menduduki peringkat 102 dari 106 negara atau justru berada di bawah Vietnam. Atau hasil penelitian Political Economic Risk Consultation (PERC) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 12 dari 12 yang diteliti.²

Sesungguhnya, pendidikan merupakan satu asset yang sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan merupakan modal utama untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan pembangunan yang harus

¹ Majalah BAKTI Edisi No.171-TH-XV – September 2005, hal 5

² Ibid, hal 5

berlangsung sepanjang masa. Sejalan dengan arus perubahan yang tiada henti, maka SDM yang diciptakan juga harus inovatif, berkualitas. Ini sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk mencapai suatu bentuk kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Untuk meraih kualitas, maka setiap bangsa harus senantiasa melakukan inovasi dalam bidang pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan. Peningkatan mutu pendidikan, terutama untuk melahirkan SDM yang berkualitas atau minimal setingkat dengan kebutuhan. Sekalipun dalam kenyataan bahwa pendidikan seringkali tidak mampu melahirkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, karena kemajuan yang dicapai di luar bidang pendidikan selalu lebih maju di banding pendidikan itu sendiri. Namun, bagaimanapun juga, realitas ini harus kita terima. Ini dunia pendidikan kita, bangsa kita, negara kita, milik kita sendiri dan tanggung jawab kita bersama.

Hadirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, adalah bagian dari strategi dan pertahapan untuk memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini.

Ketika masyarakat protes soal Ebatanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir), akhirnya Ebtanas pun dihapuskan. Sejak itu siswa sekolah menengah sempat mengalami sistem penilaian yang “berbasis proses” dengan penilaian yang dilakukan mulai dari kelas I sampai kelas III untuk menentukan kelulusannya. Tidak lama kemudian, pada tahun pelajaran 2003/2004, sistem

Alasan pemerintah menyelenggarakan UN, pertama, mengukur dan menilai kompetensi peserta didik dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Hasil ujian ini juga akan dipergunakan untuk ukuran tingkat pencapaian pendidikan nasional. Kedua, hasil ujian dipakai sebagai instrumen penentu kelulusan dan pemberian ijazah bagi peserta didik. Dalam konteks yang sama, hasil ujian ini dipergunakan sebagai alat untuk memetakan mutu sekolah dan mutu pendidikan secara nasional serta bahan pertimbangan akreditasi bagi sekolah.

Perdebatan mengenai Ujian Nasional (UN) sebenarnya sudah terjadi saat kebijakan tersebut mulai digulirkan yaitu tahun ajaran 2002/2003. Ujian Nasional (UN) atau awalnya bernama Ujian Akhir Nasional (UAN) menjadi pengganti kebijakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Hanya, sementara Ebtanas berlaku untuk semua level sekolah, Ujian Nasional (UN) hanya pada SLTP, MTs, SMU atau sederajat. Untuk SD/SDLB/SLB/MI Ebtanas diganti dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS).⁶

Dari pihak pemerintah, dasar resentralisasi adalah asumsi bahwa biang keladi buruknya mutu pendidikan adalah guru dan murid malas belajar. Agar mereka rajin, penentuan kelulusan harus diambil alih. Padahal pemerintah sendiri telah gagal dalam menjalankan kewajiban menyediakan layanan pendidikan bermutu, yang membuat guru dan murid tidak nyaman dalam menjalankan proses belajar mengajar.

⁶ David Efendi, *Pendidikan Hanya Berorientasi Akhir*, Sebuah Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa FAI UMY, 24 Mei 2007.

Melalui kebijakan Ujian Nasional (UN), daerah dan sekolah dipaksa membenarkan asumsi pemerintah tersebut. Padahal kondisinya tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pelayanan pendidikan di daerah umumnya masih buruk. Karena itu, dipilih cara instan, yaitu dengan manipulasi. Apalagi hasil Ujian Nasional (UN) juga mempertaruhkan citra daerah dan sekolah.⁷

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Bab V tentang Standar Kompetensi Lulusan, dalam pasal 25 disebutkan:⁸

(1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. (3) Standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa, menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan, dan ayat (4) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Sedangkan dalam pasal 26 dijabarkan: (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikut pendidikan lebih lanjut. (2) Standar kompetensi lulusan

⁷ Ibid.

⁸ Majalah BAKTI, Edisi No.171-TH.XV – September 2005

pada satuan pendidikan menengah umum, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sesuai pasal dan ayat yang dikutip di atas, mengatur standar keseluruhan mata pelajaran. Namun sesuai ketentuan yang disepakati, maka Mendiknas bersama instansi terkait lainnya hanya menetapkan 3 mata pelajaran yang standarkan secara nasional dan mata pelajaran lain diserahkan pada sekolah penyelenggara.

UN sebagai kebijakan pendidikan barangkali diharapkan, bisa mendongkrak kinerja dan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan patokan nilai minimal yang terus dinaikkan dari tahun ke tahun, di mana standar kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004, 4,25 pada tahun 2004/2005,⁹ maka diharapkan UN pendorong bagi pendidik, peserta didik, dan penyelenggaraan pendidikan untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan mutu pendidikan (prestasi belajar).

Untuk UN Tahun Pelajaran 2006/2007, siswa yang berhak lulus adalah mereka yang mendapat nilai rata-rata minimal 5,0 dan tidak satu pun mata

⁹ Kompas, Senin 16 April 2007.

pelajaran yang mendapat nilai kurang dari 4,25, atau memiliki nilai minimal 4,0 pada satu mata pelajaran, tetapi nilai rata-rata dari dua pelajaran lainnya 6,0.¹⁰

Ujian nasional jelaslah mengalami distorsi tujuan jika ditinjau dari fungsi faktual. Secara teoritis memang bertujuan peningkatan mutu, standarisasi pendidikan, dan lainnya. Namun, pada tataran nyata berubah menjadi “babak final” yang menentukan lulus dan tidak lulus. Babak final dalam kegiatan apa pun sudah barang tentu menegangkan, di sini tidak hanya dibutuhkan kepandaian namun juga mental juara.

Proses belajar selama tiga tahun dengan beberapa mata pelajaran disederhanakan menjadi tiga hari, bahkan tiga jam dan hanya tiga mata pelajaran. Proses belajar menjadi tidak banyak makna, *learnig* berubah menjadi *teaching to test*.

Dan, jika mau jujur makna mata pelajaran yang lain yang hanya diujikan lokal tidak banyak memberi pengaruh karena acap kali ada “kebijakan” sendiri, asal yang tiga lulus, maka yang lain tinggal mengikuti.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah. Dan yang menjadi instrumennya adalah MAN (Madarasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta. Yang menjadi alasan kenapa penulis mengambil penelitian di MAN (Madarasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta adalah MAN 2 sebagai sekolah setingkat SMU berada pada naungan Departemen Agama, tentu muatan mata pelajaran banyak difokuskan

¹⁰ Kompas, Kamis 28 Maret 2007

pada kajian agama. Dari sini mencoba melihat apakah dengan Kebijakan UN ini pihak sekolah mengesampingkan muatan mata pelajaran tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan UN (Ujian Nasional) Tahun Pelajaran 2006/2007 di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan secara obyektif bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
- b. Memberikan gambaran seperti apa pelaksanaan Kebijakan Ujian Nasional (UN) di sekolah-sekolah khususnya dalam penelitian ini di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan bersumber dari teori yang didapat selama dibangku kuliah dan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Bagi Pengambil Kebijakan

Sebagai penambah referensi dan refleksi secara bersama dan nantinya dapat dijadikan perbaikan sistem pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat agar masyarakat tidak terbelenggu oleh sistem yang berlaku baik pada pemerintahan sekarang maupun yang akan datang.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan studi pustaka sehingga aktivitas penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Menurut Koentjoroningrat teori adalah merupakan pernyataan sebab akibat atau mengenai suatu hubungan positif antar gejala-gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.¹¹

Menurut Sofyan Efendi dan Singarimbun, teori adalah merupakan suatu unsur penelitian yang paling besar peranannya, di mana fungsi dan peranan teori menjadi dasar untuk mengadakan penelitian. Peranan teori dalam penelitian adalah untuk mempermudah dalam mempelajari fenomena-fenomena alam yang menjadi pusat penelitian, dalam hal ini Kerlinger memberikan definisi teori sebagai rangkaian asumsi, konsep, definisi, dan

¹¹ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Survey*, PT Gramedia, 1991, hal 9

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Dalam hal ini untuk menjabarkan dari suatu teori harus memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Teori harus memiliki subyek yang di permasalahan.
- b) Teori harus mencerminkan variabel yang satu dengan yang lain.
- c) Teori harus memiliki tata tertib logika yang di tulis.
- d) Teori harus dapat menentukan dengan alat apa hubungan yang harus diukur atau dengan kata lain dengan metode apa penelitian yang dilakukan.

Dengan kata lain teori adalah merupakan sarana untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alam. Yang diteliti sebagai kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah: Politik, Pendidikan, Politik Pendidikan, Reformasi, Kebijakan dan Ujian Nasional (UN).

a. Politik

Kata politik pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles (384-322 SM). Dalam buku maha karya-nya *Politic*, Aristoteles memperkenalkan 3 rumpun kata dalam politik. Pertama *polis* yang berarti negara kota, kedua *arche* yang digunakan secara umum untuk melukiskan segala jenis permulaan, asal usul atau sebab, tetapi dalam politik ia mempunyai arti “pemerintahan”, sedangkan yang ketiga *koinonia* yang berarti “berbagi” atau “berpartisipasi” didalam sesuatu.¹³

¹² Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

Pemikiran Aristoteles tentang politik sangat komprehensif. Dalam pandangannya, politik memiliki sisi-sisi yang bernilai positif dan memiliki tujuan kearah yang lebih baik. Namun yang menjadi persoalan, apakah proses politik selamanya menuju kearah tersebut. Aristoteles berpendapat:

“Kota atau *polis* ada demi kehidupan yang baik. Kota adalah suatu bentuk asosiasi atau persekutuan (*koinonia*); semua asosiasi berada demi kebaikan tertentu; kota adalah yang paling tinggi dari semua asosiasi dan harus diarahkan kepada yang paling tinggi dari segala kebaikan. Dengan demikian, tujuan kota adalah untuk memungkinkan warga kota menjalani kehidupan dalam kebajikan atau mutu yang baik. Ia harus menyediakan bagi kehidupan ini bukan hanya perlengkapan fisik, tetapi juga waktu luang yang diperlukan dan jenis pendidikan dan pengasuhan yang akan membuat para warganya menjadi bajik.”¹⁴

Sejak konsep politik mulai dibicarakan orang, perkembangannya cukup pesat hingga saat ini. Berbagai teori baru lahir sebagai wujud dari proses perkembangan politik itu sendiri. Saat ini, politik telah menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang banyak diminati orang.

Oleh sebab itu, kita dituntut harus lebih teliti dalam memahami politik. Berikut ini ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam memahami dan mempelajari politik. *Pertama*, mengidentifikasi kategori-kategori aktivitas yang membentuk politik. *Kedua*, menyusun suatu rumusan yang dapat merangkum apa saja yang dapat dikategorikan sebagai politik dan *ketiga*, menyusun daftar pertanyaan yang harus dijawab untuk memahami politik.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, Hal xiii.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, Hal 1.

Walaupun demikian, bukan berarti nantinya pengertian tentang politik menghasilkan kesimpulan yang sama. Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial, kiranya perbedaan-perbedaan mengenai suatu teori merupakan hal yang wajar selama berada dalam ruang lingkup akademis.

Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sosial mengenai definisi politik:

“Kekuasaan sosial ialah kemampuan untuk mengendalikan kelakuan orang lain, baik secara langsung dengan memberikan perintah, maupun secara tidak langsung dengan jalan mempergunakan segala alat dan cara yang ada.” (*Robert M. Mac Iver*)¹⁶

“Hasil daripada polity sebagai suatu sistem adalah kekuasaan, yang akan saya beri batasan sebagai kemampuan yang digeneralisir dari suatu sistem sosial untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kepentingan bersama.” (*Talcott Parsons*)¹⁷

Namun, sejak awal hingga perkembangan yang terakhir, ada sekurang-kurangnya lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

¹⁶ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, Hal 13.

¹⁷ *Ibid*, Hal 13.

umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.¹⁸

Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari politik saja. Unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya. Dari beberapa definisi politik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh politik dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep pokok dari politik adalah:

1. Negara (*state*)
2. Kekuasaan (*power*)
3. Pengambilan keputusan (*decisionmaking*)
4. Kebijakan (*policy*)
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)¹⁹

Menurut Aristoteles adalah orang yang pertama kali memperkenalkan kata politik, yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah binatang politik. Sehingga hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Jadi politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun, kebanyakan orang beranggapan bahwa politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan.²⁰

¹⁸ *Ibid*, Hal 1-2.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 2002, Hal 9.

²⁰ Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 63

Berikut adalah beberapa pengertian ilmu politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.²¹

a. Menurut Roger H. Soltau

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu serta hubungan antara negara dengan warganya serta dengan negara-negara lain.

b. Menurut J. Barrents

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

c. Menurut DR. Wirjono Projodikoro, S.H.

Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (*macth*) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Pokoknya selalu ada kekuatan/kekuasaan.

d. Menurut Joyce Mitchell

Dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy*, Joyce Mitchell mengatakan politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

b. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik”,²² lalu kata ini mendapat awalan *me* sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan

²¹ Ibid, hal 64

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991, hlm 232

memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan, pikiran. Selanjutnya, pengertian “pendidikan” menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.²³

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas dan representatif (mewakili/mencerminkan segala segi), pendidikan ialah....*the total process of developing human abilities and behaviors, drawing on almost all life's experiences.* (seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-prilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan).

Dalam *Dictionary of Psychology* (1972) pendidikan diartikan sebagai....*the institutional procedures which are employed in*

²³Muhibbin Syah, M.Ed., *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, hlm 10, PT Remaja Rosdakarya-Bandung, 2004.

accomplishing the development of knowledge, habits, attitudes, etc. Usually the term is applied to formal institution. Jadi, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung secara informal dan nonformal di samping secara formal di sekolah, madrasah dan institusi-institusi lainnya. Bahkan menurut definisi di atas, pendidikan juga dapat berlangsung dengan cara mengajar diri sendiri (*self-instruction*).²⁴

Selanjutnya, menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981) pendidikan adalah:

....usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya...orang dewasa itu adalah orang tua si anak atau orang yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta atau kiai dalam lingkungan keagamaan, kepala-kepala asrama dan sebagainya.²⁵

Pendidikan sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Ia menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban serta tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan negara.

Pendidikan itu sendiri pada hakekatnya – meminjam istilah – Paulo

Freire – merupakan sebuah proses humanisasi yakni praktik penyadaran

manusia akan hakekat dan realitas kemanusiaan serta dunianya. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya penyadaran yang membebaskan manusia dari praktek-praktek dehumanisasi.²⁶ Pendidikan dengan demikian juga berarti sebuah konstruksi nilai yang bersifat humanis dan tidak mengenal segala bentuk relasi hierarkis antara subyek dan obyek.

Dalam perputaran roda sejarah peradaban manusia, pendidikan selalu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena masih dianggap begitu pentingnya pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Pendidikan sebagai proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam rangka menyiapkan generasi penerusnya agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang mereka anut, sesungguhnya merupakan salah satu tradisi umat manusia yang sudah hampir setua usia umat manusia itu sendiri. Pendidikan memang sudah ada sejak zaman dahulu kala menjadi salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan eksistensi kehidupan maupun budaya mereka.

Hal ini melahirkan banyak paham, visi, bahkan ideologi bagi pendidikan itu sendiri. Pendidikan telah melahirkan banyak pandangan, gagasan maupun paham dalam berbagai bentuk. Sejarah penyelenggaraan pendidikan yang sudah dimulai sejak tahun 900 SM, saat sistem

²⁶ Lembaga Pers Mahasiswa, *PILAR DEMOKRASI*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Edisi II Tahun II/April 2000. Hlm 30

pendidikan telah dikembangkan di kota Sparta dan sejak itu pendidikan tidak pernah diarahkan untuk dirinya sendiri.²⁷

Pendidikan banyak dipahami sebagai proses pembentukan watak, alat pelatihan keterampilan, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan keterampilan kerja. Sementara bagi paham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguasai teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam raya dan manusia. Namun banyak kalangan praktisi yang menempatkan pendidikan justru sebagai wahana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia.²⁸

Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban manusia maupun sebagai strategi budaya dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka. Itulah sebabnya, melihat begitu pentingnya pendidikan bagi umat manusia, banyak peradaban manusia yang “mewajibkan” masyarakat untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Misalnya saja bagi kalangan umat muslim ada tradisi keyakinan keagamaan yang berbunyi bahwa: “menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi umat muslim laki-laki maupun perempuan”.

²⁷ Jurnal Demokrasi, *Forum LSM DIY*, Volume II No. 4 Juni 2004. hlm 69

²⁸ Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan antara Kompetisi dan Keadilan*, Insist Press, Cindelaras, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, Hlm III.

Bahkan masih dilanjutkan dengan anjuran, “tuntutlah ilmu sampai ke negeri China”.

Dalam perjalanan peradaban manusia, banyak usaha yang dilakukan senantiasa menjaga ataupun melestarikan tradisi pendidikan melalui berbagai bentuk dan institusi pendidikan. Walaupun sebagian bentuk dan institusi pendidikan tersebut sebagian besar telah punah, namun beberapa masih tetap bertahan. Institusi pendidikan itu misalnya saja *Academia* di Yunani, Padepokan atau Pesantren di Jawa, *Monastery* di kalangan Gereja, Madrasah di kalangan Muslim ataupun *Sanikaten* di India, dan masih banyak lagi. Salah satu institusi pendidikan yang sekarang menjadi model yang dominan adalah yang dikenal dengan “sekolah” ataupun “universitas”.²⁹

Selain itu, sejarah perjalanan perkembangan keyakinan dan pemikiran umat manusia tentang pendidikan juga telah melahirkan berbagai ideologi serta paradigma tentang hakikat, tujuan dan metode pendidikan yang berbeda-beda. Sementara itu manusia terus belajar dari pengalaman mereka tentang penyelenggaraan pendidikan. Mereka mulai merasakan bahwa pendidikan dalam perjalanannya semakin dirasakan tidak terbebas dari kepentingan sosial politik dan ekonomi. Bahkan pendidikan lambat laun dirasakan telah di gunakan oleh para penguasa baik politik maupun ekonomi demi melanggengakan dominasi mereka.

²⁹ Ibid, hlm VI.

c. Politik Pendidikan

Politik pendidikan merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, baik itu kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dalam dunia politik pendidikan seharusnya tidak melupakan dari esensi dasarnya, ketika politik pendidikan yang dijalankan orang atau individu maupun sekelompok orang harus bersifat memanusiakan manusia (*humanis*), artinya: politik pendidikan bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang saja. Apabila politik pendidikan yang hanya dimiliki oleh atau kepentingan segelintir orang saja, maka politik pendidikan sudah hilang dari esensinya (*dehumanisasi*) artinya: tidak memanusiakan-manusia.

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pada rentan waktu tahun 1945-1949 dikeluarkan kurikulum 1947. Tahun 1950-1961, ditetapkan kurikulum 1952. kurikulum terakhir pada masa Orde Lama adalah kurikulum 1964.³⁰

Masa Orde Baru lahir empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya muncul Kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang Disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru, yakni Kurikulum

³⁰ Kompas, Kamis 31 Mei 2007

1994. Kurikulum itu menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru.³¹

Pada era reformasi muncul Kurikulum 2004 yang dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang pada tahun 2006 dilengkapi dengan Standar Isi dan Standar Kompetensi (Sisko) yang memandu sekolah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).³²

Sebenarnya sudah sejak lama ketika kebijakan pemerintah di bidang pendidikan selalu berubah, maka yang paling merasakan dampak dari perubahan tersebut adalah siswa. Pada tahun 1979, kelulusan siswa sempat tertunda sampai enam bulan (satu semester) ketika terjadi perubahan sistem tahun pembelajaran. Sejak diberlakukan Kurikulum 1984, beban mata pelajaran pun bertambah dengan masuknya mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang dinilai mengandung banyak pesan politik kekuasaan.³³

Ketika menjelang berakhirnya Kurikulum 1994, tiba-tiba saja muncul "Suplemen Kurikulum 1994" yang kemudian digantikan dengan Kurikulum 2004. Baru belakangan diketahui bahwa Kurikulum 2004 adalah kurikulum eksperimen, yakni ketika masyarakat dikagetkan dengan penarikan sejumlah buku sejarah yang dinilai menyimpang dari kurikulum resmi pemerintah.³⁴

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Kompas, Senin 28 Mei 2007

³⁴ Ibid.

Apabila dicermati, penyusunan kurikulum yang silih berganti di Indonesia itu menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan kukunya dalam penentuan isi kurikulum.

Menurut Bourdieu,³⁵ setiap tindakan pedagogis yang bertujuan untuk memproduksi kebudayaan dapat disebut kekerasan simbolis yang sah. Kekuatan kekerasan ini berasal dari hubungan kekuasaan sesungguhnya yang disembunyikan oleh kekuatan pedagogis.

Kurikulum yang berlaku pada suatu negara, termasuk Indonesia, sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Dan umumnya para pendidik dan masyarakat luas tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum di dalam proses pembelajaran peserta didik.

Dunia pendidikan memang sering kali menganggap bahwa kurikulum adalah soal teknis belaka. Namun, sebenarnya, berbicara tentang kurikulum adalah berbicara tentang sumber-sumber kekuasaan dalam dunia pendidikan.

Kurikulum adalah program dan isi dari suatu sistem pendidikan yang berupaya melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antargenerasi dalam suatu masyarakat.

Dalam sebuah masyarakat homogen, masalah kurikulum tidak terlalu merisaukan. Namun dilihat dari konteks masyarakat yang majemuk

4. Pendidikan Kurikulum adalah pertempuran antarkekuasaan yang

perannya dengan baik, artinya para pelaksana kebijakan harus mengetahui maksud dan tujuan tersebut.

- 5) Evaluasi kebijakan. Menurut Charles O Jones yang dikutip oleh Islamy, evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.⁴⁰

c) Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan konsep implementasi kebijakan:

“Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa” yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”⁴¹

Sedangkan Udoji menyatakan bahwa: “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.”⁴²

Model-model Implementasi Kebijakan:

- a. Model yang dikembangkan oleh Brian W Hogwood dan Lewis A Gunn (1978). Model mereka ini juga disebut sebagai “*The Top*

⁴⁰ Ibid, Hlm 113.

⁴¹ Mazmanian dan Sabatier, dalam Solikin “*Analisis Kebijakan Negara*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 123.

⁴² Abdul Wahab, dalam Solikin, “*Analisis Kebijaksanaan dari Federalisme ke Implementasi Kebijakan Negara*” Bumi Aksara, Jakarta, 1991, Hlm 50.

Down Approach". Untuk mengimplementasikan kebijakan secara baik maka harus dipenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
 2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai.
 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 4. Kebijaksanaan didasari sebab-akibat (kausalitas):
 - 1) Hubungan bersifat langsung dan kecilnya hubungan saling ketergantungan.
 - 2) Pemahaman kesepakatan terhadap tujuan dan terdapat perincian serta penempatan tugas.
 - 3) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - 4) Pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.
- b. Model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) yang disebut juga sebagai *a Model of Policy Implementation Process* (Model Proses Implementasi Kebijakan). Implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi kebijakan:
1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
 2. Jangkauan/Lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Dengan demikian tingkat keberhasilan implementasi akan lebih tinggi

jika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

c. Model yang dikembangkan oleh Mazmainan dan Paul A Sabatier yang disebut *a Framework for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Kebijakan). Peran penting dari analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap kesinambungan dukungan, tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.⁴³

Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

Amir Santoso mengutip pendapat Van Metter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan keberhasilannya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan (enforcement) karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, disposisi dari penyelenggaranya.⁴⁴

⁴³ Ibid, Hlm 70-81.

⁴⁴ Amir Santoso, "*Pengantar Analisis Kebijakan Negara*", Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm 9.

Di dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Komunikasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sebagai yang dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

b. Sumberdaya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksanaannya.

c. Sikap Pelaksana/Disposisi

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur yang ada harus menggambarkan suatu struktur yang ada, tidak statis tetapi memberdayakan semua staf yang ada.

f. Ujian Nasional

Ujian yang merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar merupakan salah satu komponen dalam setiap pembelajaran. Indonesia memiliki beberapa periode di mana evaluasi belajar mempunyai nama

berbeda-beda, mulai Ujian Negara, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebatanas) hingga terakhir Ujian Nasional (UN).

Perbedaan signifikan pada sistem evaluasi belajar periode sekarang dibanding periode-periode sebelumnya adalah kelulusan siswa ditentukan oleh hasil ujian yang diselenggarakan pemerintah. Jika pada sistem sebelumnya kelulusan siswa bergantung pada banyak aspek, seperti nilai ujian pemerintah, ujian sekolah, dan pantauan sekolah terhadap proses belajar siswa selama tiga tahun, dalam sistem UN target nilai tertentu yang harus dicapai menjadi patokan kelulusan.

Meski dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 45 Tahun 2006 tentang UN Tahun Pelajaran 2006/2007 pada pasal 4 ditegaskan bahwa UN hanyalah salah satu pertimbangan untuk penentuan kelulusan siswa, tapi adanya patokan nilai tersebut mau tak mau tetap menjadi pedoman sekolah untuk meluluskan siswa-siswanya. Hal ini yang terus mengundang perdebatan mengenai UN.

Pihak yang menentang UN menilai kualitas pendidikan negeri ini belum standar sehingga tak bisa diukur dengan alat ukur standar di seluruh wilayah. Mereka lebih setuju bila UN hanya dipakai sebagai pemetaan mutu pendidikan di Indonesia seperti yang dikatakan pemerintah di awal sistem UN dibuat.

Beberapa penyimpangan dalam kebijakan UN mencakup beberapa aspek yaitu aspek pedagogis, yuridis, dan aspek psikologis.⁴⁵ Dalam UN hanya kemampuan kognitif yang diutamakan dan paling menentukan. Sementara aspek psikomotorik dan afektif diabaikan begitu saja. Proses belajar 3 tahun, nasibnya ditentukan oleh beberapa lembar saja.

Secara yuridis terdapat pelanggaran terhadap UUD 1945, UU No. 20 tahun 2003. beberapa pasal, misalnya pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas dasar, isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. UN hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan sepihak oleh pemerintah.

Pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kenyataannya, selain merampas hak guru melakukan penilaian, UN mengabaikan unsur penilaian yang berupa proses. Selain itu, pada pasal 59 ayat 1 dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Tapi dalam UN pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang sebenarnya tugas pendidik.

Aspek ekonomi, pelaksanaan UN memboroskan biaya. Tahun lalu dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai 260 miliar, belum ditambah

⁴⁵ David Efendi, *Pendidikan Hanya Berorientasi Akhir*, Sebuah Makalah yang disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Keluarga Mahasiswa FAI UMY, 24 Mei 2007.

dari dana APBD dan masyarakat. Serta sistem pengelolaan selama ini masih sangat tertutup dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Kondisi ini memungkinkan sarat penyimpangan (korupsi) dalam UN.

Aspek sosial dan psikologis, dalam mekanisme UN yang diselenggarakan, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 3,01 pada tahun 2002/2003 menjadi 4,01 pada tahun 2003/2004, 4,25 pada tahun 2004/2005 dan 5,0 pada tahun 2006/2007. ini menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaran-pelajaran yang akan di-UN-kan di sekolah maupun di rumah.

Jika peningkatan dan pemetaan mutu dijadikan alasan untuk menggelar Ujian Nasional (UN), maka tak satupun pemangku kepentingan menolak. Masalahnya, hajatan nasional yang tiap tahun menelan anggaran 250 miliar tersebut dijadikan alat penentuan kelulusan.

Ironisnya, nasib lulus atau tidak lulusnya siswa ditentukan oleh tiga mata pelajaran dan pada ujung proses pembelajaran. Pihak Depdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) boleh saja secara normatif membantah bahwa UN hanya salah satu penentu kelulusan, dan ujian sekolah pun ikut menentukan. Namun, pada praktiknya di lapangan, UN tetap menjadi penghalang kendati siswa meraih nilai bagus pada ujian sekolah.

Kemerdekaan guru terampas, otonomi pedagogi mereka terpasung.

Balok, apakah anda lebih paham perkembangan prestasi siswa. Mereka

memantau perkembangan siswanya dari hari ke hari. Karena terpatok pada target kelulusan, guru akhirnya hanya mengajarkan materi yang kira-kira akan tersuguhkan sebagai soal UN.

Di sinilah awal pengangkaran akan ruh pendidikan yang mengedepankan pembebasan, pencerahan, egalitarianisme, dan demokrasi. Pendidikan sudah tak lagi mengarah pada pembentukan watak dan karakter, tapi lebih pada aspek akademik dan cenderung hafalan.

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kerancuan.

Definisi konsepsional yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Politik

Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan, kontrol kekuasaan, serta pembentukan dan penggunaan kekuasaan.

b. Pendidikan

Proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Biasanya proses pendidikan dibagi dalam kategori

pendidikan formal, non formal berikut pendidikan luar sekolah

c. Politik Pendidikan

Usaha-usaha yang dilakukan Negara khususnya di Indonesia untuk mencerdaskan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan Ujian Nasional (UN), tentunya ini bagian dari Politik Pendidikan itu sendiri.

d. Reformasi

Perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik dan agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau Negara

e. Kebijakan

Serangkaian alternatif yang dibangun oleh pengambil keputusan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan, pedoman pelaksanaan, tindakan-tindakan tertentu dalam kerangka menindaklanjuti strategi yang dipilih, menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan.

f. Ujian Nasional

Ujian nasional dimaknai sebagai ujian yang dilaksanakan serentak secara nasional dengan standar kompetensi yang sama pada tiga bidang uji atau mata pelajaran yang sama. Tujuan akhir dilaksanakannya ujian nasional adalah peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi

operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.⁴⁶

Penelitian ini akan menganalisis data dengan menggunakan variabel-variabel:

1. Tahapan Pihak MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta dalam Menyelenggarakan UN (Ujian Nasional) Tahun Pelajaran 2006/2007.
 - a. Persiapan yang dilakukan oleh MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta dalam menghadapi UN tahun Pelajaran 2006/2007.
 - b. Sosialisasi pihak pendidik terhadap anak didik dalam menghadapi UN Tahun Pelajaran 2006/2007.
 - c. Target Standarisasi yang ditetapkan Oleh Pihak MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.
2. Pelaksanaan UN (Ujian Nasional) pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.
 - a. Apa saja kendala yang dihadapi para pendidik di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta dalam menghadapi UN (Ujian Nasional) tahun pelajaran 2006/2007.
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi para siswa dan siswi di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta dalam menghadapi UN (Ujian Nasional) tahun pelajaran 2006/2007.
3. Evaluasi UN (Ujian Nasional) Pada MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.

⁴⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, Hal 46.

- a. Evaluasi Terhadap Hasil Nilai UN (Ujian Nasional).
- b. Pola Pengajaran Guru di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.
- c. Sarana dan Prasarana yang ada di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki buku referensi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu metode didalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian *deskriptif* adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan dengan fenomena yang diteliti atau diselidiki.⁴⁷

2. Unit Analisis

Adapun unit analisis yang dipakai dalam melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Ujian Nasional di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta sebagai instrumennya adalah para Guru yang mengajar

⁴⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal 64.

mata pelajaran yang di UN kan dan para siswa-siswi sebagai peserta dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer yakni data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli.
- b. Data sekunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Dengan demikian data ini disebut juga data tidak asli.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik Wawancara (komunikasi) dan Dokumentasi (dokumenter).

- a. Teknik wawancara (komunikasi) adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden dengan mempergunakan wawancara (interview) sebagai alat pengumpul data.⁴⁹ Responden dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara adalah para Guru dan Siswa-Siswi yang lulus dan tidak lulus di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 2 Kota Yogyakarta.

⁴⁸ Hadari Nawawi, 2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hal: 80

⁴⁹ *Ibid...* Hal: 110

- b. Teknik Dokumentasi (dokumenter) adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁵⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu menganalisa permasalahan tanpa menggunakan data statistik atau matematis, serta dengan menganalisa isi agar mendapatkan jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik.⁵¹

⁵⁰ *Ibid...* Hal: 133

⁵¹ Noeng Muhadjir, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta. Hal: 71